

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan sosial yang paling mendasar dan terus menjadi tantangan serius bagi berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun pemerintah dan berbagai pihak telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkannya, masih terdapat sebagian masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, perumahan layak, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya tingkat pendidikan, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya dan fasilitas pendukung. Situasi tersebut membuat masyarakat yang berada pada garis kemiskinan sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan yang terus berulang.

Todaro dan Smith (2020), menyatakan bahwa kemiskinan berkaitan erat dengan rendahnya kualitas hidup individu, ditandai dengan kekurangan nutrisi, tingkat pendidikan rendah, dan keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar. Kemiskinan muncul sebagai akibat dari ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Ketika sebagian besar kekayaan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, maka kelompok masyarakat miskin akan semakin terpinggirkan. Hal ini diperparah oleh distribusi kesempatan yang tidak merata, rendahnya kualitas pelayanan publik, dan lemahnya infrastruktur pendukung (Kadji, 2020).

Sejalan dengan pandangan tersebut, Barbier dan Hochard (2016), menegaskan bahwa kemiskinan dapat menghambat tercapainya pertumbuhan

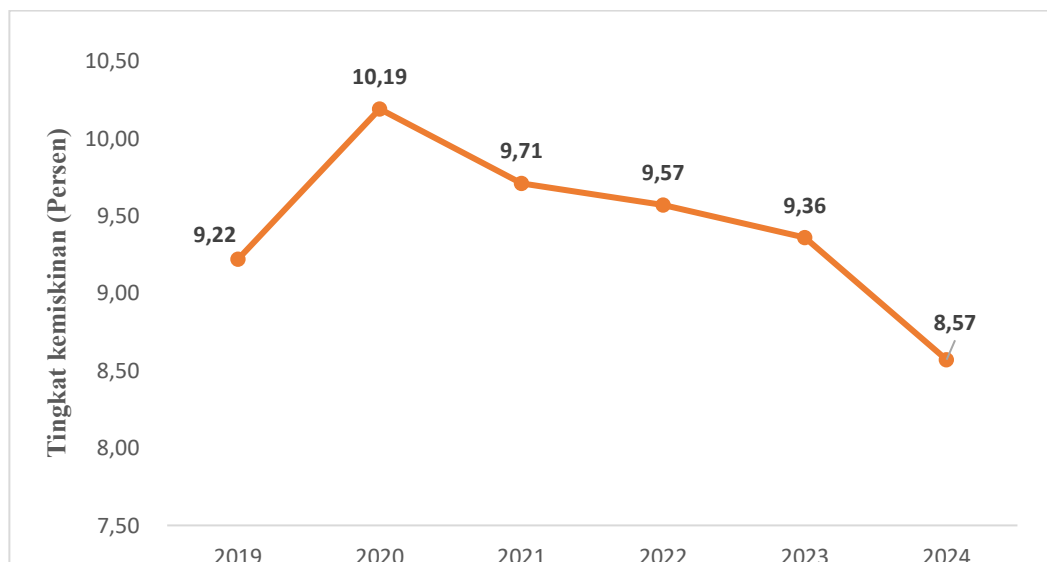
yang inklusif dan berkelanjutan. Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat meningkatkan kehidupan yang lebih layak atau dapat dikatakan tidak dapat meningkatkan standar hidup yang lebih baik. Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan sulit untuk dihilangkan salah satunya karena kualitas sumber daya manusia yang masih tergolong rendah (Andhykha *et al.*, 2018).

Di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi agenda prioritas dalam pembangunan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia pada September 2024 tercatat sebesar 8,57 persen. Meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun, laju penurunannya masih tergolong lambat, terutama di daerah pedesaan dan kawasan timur Indonesia. Disparitas antarwilayah juga masih tinggi, di mana provinsi-provinsi di Pulau Jawa cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah dibandingkan wilayah Indonesia Timur seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.

Selain itu, kemiskinan di Indonesia juga rentan dipengaruhi oleh guncangan eksternal, seperti krisis ekonomi global, pandemi, maupun bencana alam. Seperti pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu telah menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin akibat hilangnya mata pencaharian dan penurunan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia memerlukan kebijakan yang adaptif, tanggap terhadap risiko, dan menitikberatkan pada perlindungan sosial bagi kelompok rentan (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020).

Berbagai program telah dijalankan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan. Namun, efektivitas program-program yang dibentuk perlu terus ditingkatkan dan diselaraskan dengan upaya pengendalian inflasi, penurunan ketimpangan pendapatan, serta kebijakan pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci agar strategi pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan kebijakan terpadu yang memperhatikan stabilitas harga, pemerataan pendapatan, dan pelestarian lingkungan, diharapkan tingkat kemiskinan di Indonesia dapat semakin berkurang dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara adil dan merata (Teguh *et al.*, 2018).

Adapun perkembangan tingkat kemiskinan Indonesia dari tahun 2019 hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2019-2024 (Persen)**

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2025*

Gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,22 persen. Namun pada tahun 2020, tingkat kemiskinan melonjak tajam menjadi 10,19 persen. Peningkatan ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia. Pandemi menyebabkan gangguan besar terhadap aktivitas ekonomi, penurunan pendapatan rumah tangga, meningkatnya pengangguran, serta menurunnya produktivitas di berbagai sektor, sehingga mendorong lebih banyak masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan. Disisi lain kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah telah mempengaruhi aktivitas ekonomi dan pendapatan rumah tangga, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan dan peningkatan angka kemiskinan (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021).

Memasuki tahun 2021, tingkat kemiskinan mulai mengalami penurunan menjadi 9,71 persen, seiring dengan upaya pemulihan ekonomi nasional dan berbagai kebijakan stimulus pemerintah seperti program bantuan sosial, insentif usaha, serta pelonggaran mobilitas yang mendorong kembali aktivitas ekonomi masyarakat (Klasen, 2023).

Tren penurunan ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,57 persen pada tahun 2022, dan kemudian menurun lagi menjadi 9,36 persen pada tahun 2023. Terus menurun hingga tahun 2024 sebesar 8,57%. Penurunan tersebut mencerminkan proses pemulihan ekonomi yang semakin stabil, didukung oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang mulai membaik, pemulihan sektor-sektor produktif, serta penyesuaian kebijakan

pemerintah dalam menghadapi tantangan pasca-pandemi. (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025)

Kemiskinan sebagai dampak dari ketimpangan yang terjadi dalam distribusi sumber daya ekonomi dan akses terhadap kesempatan. Menurut Stiglitz (2002), kemiskinan merupakan masalah struktural yang dipengaruhi oleh kebijakan dan institusi yang tidak adil, yang menghalangi masyarakat miskin untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Kemiskinan juga erat kaitannya dengan isu ketimpangan. Mankiw (2018), menyatakan bahwa kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang semakin melebar dapat memperparah tingkat kemiskinan, terutama di negara berkembang. Ketika distribusi pendapatan tidak merata, masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin sulit keluar dari jurang kemiskinan. Hal ini juga relevan dengan kondisi di Indonesia, di mana ketimpangan masih menjadi salah satu tantangan pembangunan nasional.

Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan tingkat kemiskinan adalah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan didefinisikan sebagai kesenjangan antara penduduk yang berpendapatan tinggi dengan penduduk yang berpendapatan rendah (Maskur *et al.*, 2023). Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pendapatan per kapita masyarakat juga akan mengalami peningkatan dan hal ini tentunya akan berdampak terhadap pendapatan masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan untuk ikut mengalami peningkatan.

Menurut Todaro dan Smith (2011), dalam *Unequal Distribution Theory*, ketimpangan yang tinggi menyebabkan distorsi sosial dan ekonomi karena kelompok kaya mendominasi sumber daya produktif dan kesempatan ekonomi. Ketimpangan yang melebar juga menghambat pemerataan hasil pembangunan, menurunkan produktivitas tenaga kerja miskin, dan memperburuk kemiskinan struktural.

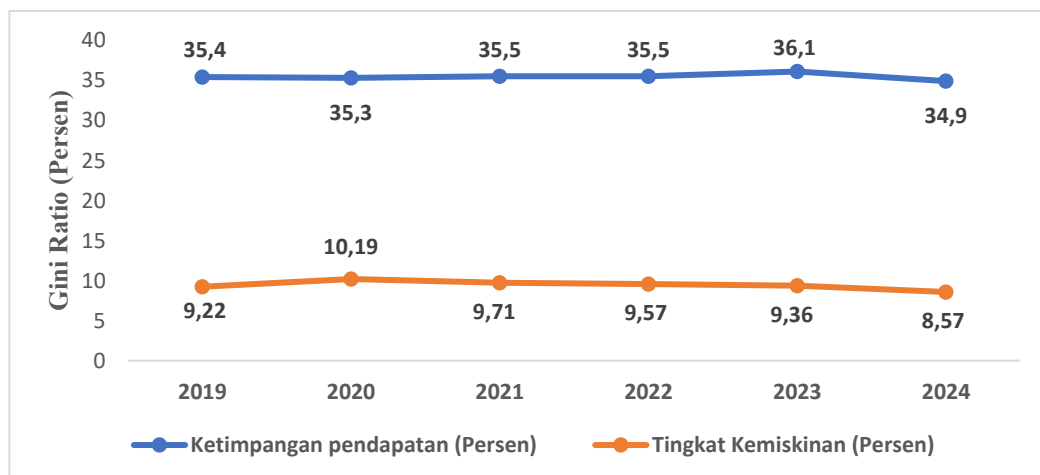
Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa ketimpangan pendapatan justru dapat menurunkan kemiskinan. Hal ini didasari oleh teori *Trickle-Down Effect* yang dikemukakan oleh Arthur Okun (1975) yang dikutip dalam penelitian Limberg (2020), yang menyatakan bahwa ketika kelompok berpendapatan tinggi memperoleh porsi pendapatan yang lebih besar, mereka akan meningkatkan konsumsi dan investasi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja baru, pendapatan masyarakat berpendapatan rendah juga meningkat sehingga tingkat kemiskinan dapat berkurang.

Salah satu indikator yang paling umum digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah indeks gini atau gini ratio, yaitu suatu angka yang menunjukkan seberapa merata distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1, di mana angka 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sepenuhnya merata, sedangkan angka 1 berarti ketimpangan yang sangat tinggi dengan seluruh pendapatan hanya dikuasai oleh satu individu atau kelompok kecil. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan

ekonomi, pendapatan per kapita masyarakat diharapkan juga mengalami peningkatan (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025).

Jika pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan distribusi pendapatan yang merata, maka ketimpangan pendapatan tetap akan tinggi dan kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan sulit merasakan manfaat pertumbuhan tersebut, Hal ini dapat menyebabkan terjadinya eksklusi sosial, memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin, serta menghambat upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Ketimpangan yang terus dibiarkan juga berisiko menimbulkan ketidakstabilan sosial dan menghambat tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (Nalle *et al.*, 2022).

Adapun perkembangan gini ratio dan tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024 yaitu sebagai berikut:



**Gambar 1. 2 Gini Ratio dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2019-2024 (Persen)**

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2025*

Gambar 1.2 di atas menunjukkan bahwa gini ratio Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024 cenderung meningkat. Pada tahun 2019, indeks gini tercatat

sebesar 35,4%, yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif stabil. Kondisi ini dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi global serta fluktuasi harga komoditas yang berdampak pada pendapatan masyarakat kelas menengah ke bawah (Maskur *et al.*, 2023).

Pada tahun 2020, indeks gini mengalami penurunan tipis menjadi 35,3%, yang diduga akibat kebijakan stimulus fiskal pemerintah untuk menangani dampak pandemi COVID-19, melalui program bantuan sosial dan perlindungan sosial yang diperkuat guna meningkatkan kesejahteraan kelompok berpendapatan rendah.

Namun, pada 2021, terjadi kenaikan indeks gini menjadi 35,5%, yang mencerminkan ketidakmerataan pemulihan ekonomi pasca pandemi, di mana kelompok berpendapatan tinggi pulih lebih cepat dibandingkan kelompok bawah. Kenaikan harga pangan dan energi juga memperberat beban masyarakat miskin sehingga ketimpangan semakin melebar (Badan Pusat Statistik, 2022).

Pada 2022, indeks gini relatif stabil di angka 35,5%, mencerminkan upaya pemerintah dalam mengendalikan ketimpangan melalui program bantuan sosial berkelanjutan dan pengendalian inflasi, meskipun masih terdapat tantangan terkait akses pendidikan dan peluang ekonomi yang tidak merata. Pada 2023, indeks gini meningkat menjadi 36,1%, menandakan melebar kesenjangan pendapatan akibat tekanan inflasi tinggi dan kenaikan harga komoditas global, yang secara relatif menurunkan daya beli masyarakat miskin lebih signifikan dibanding kelompok kaya. Ketimpangan akses pada transformasi digital juga menjadi faktor pendukung peningkatan ketimpangan tersebut (Bank Indonesia, 2024).

Pada 2024, indeks gini menurun ke angka 34,9%, yang menunjukkan pemulihan ekonomi lebih inklusif dan keberhasilan program pengurangan kemiskinan seperti pelatihan kerja dan peningkatan akses layanan dasar, sehingga meningkatkan pendapatan kelompok berpendapatan rendah dan menurunkan ketimpangan. Berdasarkan grafik di atas ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan tidak selalu bergerak seiringan. Pada 2023 ketimpangan meningkat sementara tingkat kemiskinan menurun. Sebaliknya pada 2024, penurunan ketimpangan disertai penurunan.

Ketimpangan pendapatan yang tinggi seringkali menjadi penyebab struktural dari kemiskinan yang persisten. Meskipun angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun setelah puncak pandemi (2020–2023), namun peningkatan ketimpangan menandakan bahwa manfaat dari pemulihan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas. Sementara itu, masyarakat miskin dan rentan mungkin tidak mengalami peningkatan kesejahteraan yang signifikan, atau bahkan tetap berada dalam kondisi rentan terhadap guncangan ekonomi (Yolanda *et al.*, 2020).

Penelitian mengenai pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan menunjukkan hasil yang beragam. Maskur *et al.* (2023), menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok kaya. Ketimpangan yang terus meningkat dapat memperlambat penurunan kemiskinan, karena kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, lapangan pekerjaan

yang layak, serta akses permodalan dan kewirausahaan. Akibatnya, mereka sulit keluar dari lingkaran kemiskinan (Rusdati *et al.*, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Limberg (2020), menemukan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di beberapa negara ASEAN karena peningkatan investasi oleh kelompok kaya menciptakan lapangan kerja baru sehingga masyarakat dengan pendapatan rendah memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan. Sementara itu penelitian Amalia *et al.* (2024) dan Kasman *et al.* (2024) yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

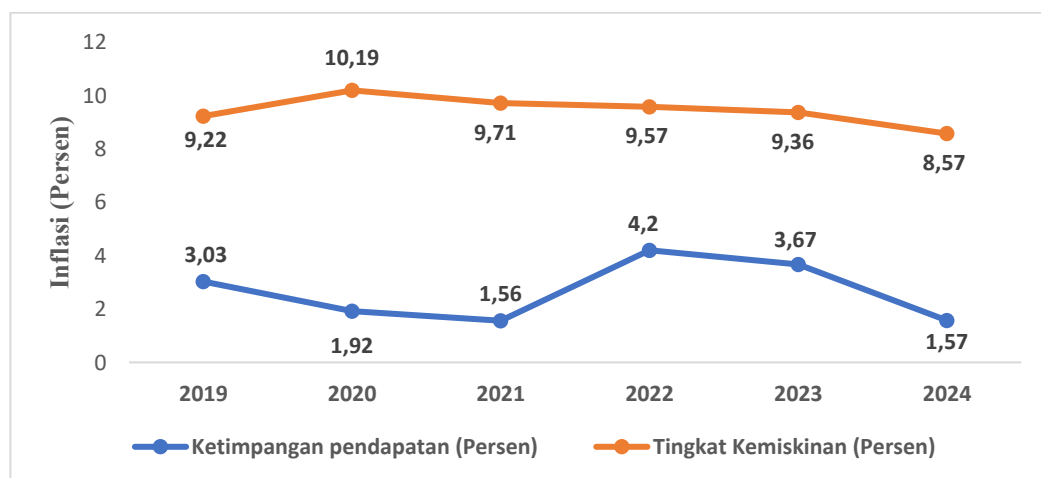
Selain, ketimpangan pendapatan inflasi juga menjadi faktor penting yang berdampak pada tingkat kemiskinan. Kenaikan harga barang dan jasa dapat menurunkan daya beli masyarakat, sehingga memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga miskin (Sukirno, 2021). Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat meningkatkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Inflasi menggambarkan tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga.

Secara umum, inflasi menggambarkan tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Indikator ini sering digunakan untuk menilai stabilitas ekonomi suatu negara, karena fluktuasi inflasi memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan ekonomi, mulai dari daya beli masyarakat, biaya produksi, hingga tingkat investasi. Ketika inflasi meningkat tajam, beban ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat miskin menjadi semakin

berat, sebab sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, energi, dan transportasi.

Inflasi juga dijelaskan dalam *Keynesian Theory* yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes (1936), di mana lonjakan harga yang tidak disertai peningkatan upah akan menurunkan konsumsi rumah tangga. Hal ini berdampak langsung pada penurunan kesejahteraan masyarakat miskin, karena mereka mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi kebutuhan pokok yang harganya semakin mahal.

Perkembangan inflasi dan tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2019 hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. 3 Inflasi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2019-2024 (Persen)**

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2025*

Gambar 1.3 di atas menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024 tidak stabil. Tingkat inflasi Indonesia pada tahun 2019 tercatat sebesar 3,03%, berada dalam rentang sasaran inflasi nasional dan mencerminkan kondisi harga yang relatif stabil. Namun, pada tahun 2020 inflasi turun tajam

menjadi 1,92% seiring melemahnya permintaan domestik akibat pembatasan aktivitas ekonomi selama pandemi COVID-19 (Badan Pusat Statistik, 2021).

Pada tahun 2021, inflasi terus berada pada level rendah yakni 1,56%, mencerminkan lambatnya pemulihan daya beli masyarakat serta rendahnya tekanan harga di sebagian besar komponen pangan. Memasuki 2022, inflasi melonjak menjadi 4,2% dipicu oleh kenaikan harga energi dan pangan global, serta penyesuaian harga bahan bakar dalam negeri, sehingga memberikan tekanan terhadap biaya hidup masyarakat. Pada 2023, inflasi sedikit menurun ke 3,67% sejalan dengan kebijakan stabilisasi harga dan pengendalian distribusi pangan oleh pemerintah, meskipun masih berada pada level relatif tinggi akibat dampak lanjutan gejolak global). Di tahun 2024, inflasi kembali turun signifikan menjadi 1,57%, yang menunjukkan membaiknya kestabilan harga dan terkendalinya inflasi pangan melalui koordinasi pusat dan daerah.

Pergerakan inflasi selama periode 2019–2024 memiliki implikasi terhadap tingkat kemiskinan nasional. Pada saat inflasi tinggi, khususnya tahun 2022 dan 2023, tekanan kenaikan harga cenderung lebih memberatkan kelompok masyarakat berpendapatan rendah sehingga berpotensi memperlambat penurunan kemiskinan. Sebaliknya, penurunan inflasi pada 2024 berkontribusi terhadap meningkatnya daya beli masyarakat miskin, sehingga sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan dari 9,36% pada 2023 menjadi 8,57% pada 2024. Inflasi yang rendah cenderung menguntungkan bagi masyarakat miskin karena harga kebutuhan pokok tidak mengalami lonjakan, namun tanpa adanya peningkatan

pendapatan, masyarakat tetap berada dalam kondisi miskin (Solikaturun *et al.*, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Frisnoiry *et al.* (2024) dan Rosalyne *et al.* (2023) menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian Oktaviani dan Sari (2020), menjelaskan bahwa pengaruh inflasi terhadap kemiskinan dapat diminimalkan apabila pemerintah berhasil mengendalikan harga pangan dan energi melalui kebijakan subsidi yang tepat sasaran. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Kolibu *et al.* (2016) menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara.

Selain faktor ekonomi, isu lingkungan seperti meningkatnya emisi karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) juga perlu diperhatikan dalam konteks kemiskinan. Emisi karbon dapat memengaruhi tingkat kemiskinan melalui beberapa jalur. Perubahan iklim akibat emisi karbon, seperti peningkatan suhu, bencana alam, dan penurunan kualitas lingkungan, dapat memperburuk kondisi ekonomi dan sosial. Selain itu, kebijakan untuk mengurangi emisi karbon, seperti pajak karbon, dapat berdampak pada harga konsumen, yang membebani rumah tangga (Wang *et al.*, 2024).

Hubungan antara emisi karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dan tingkat kemiskinan dapat dijelaskan melalui *Poverty–Environment Trap Theory* yang dikemukakan oleh Partha Dasgupta (1993), dan diperkuat oleh laporan World Bank (2001). Teori ini menyatakan bahwa kemiskinan dan kerusakan lingkungan memiliki hubungan dua arah yang saling memperburuk. Peningkatan emisi CO<sub>2</sub> mempercepat perubahan iklim, menurunkan produktivitas pertanian, serta

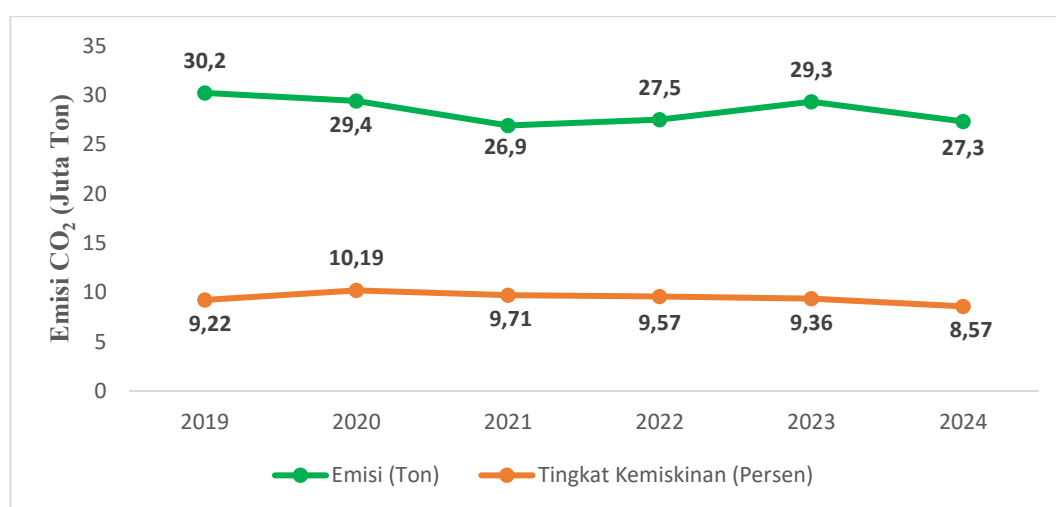
meningkatkan risiko bencana, sehingga masyarakat miskin menjadi lebih rentan terhadap kehilangan pendapatan (Dasgupta, 1993; World Bank, 2001).

Emisi CO<sub>2</sub> sebagai indikator degradasi lingkungan memiliki dampak tidak langsung pada kemiskinan melalui penurunan produktivitas sektor pertanian, kesehatan masyarakat, dan meningkatnya kejadian bencana (Hallegatte *et al.*, 2016). Pertanian adalah pekerjaan utama bagi banyak orang yang tinggal di desa-desa di Indonesia. Namun, meningkatnya emisi karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) membuat cuaca menjadi sulit diprediksi, seperti musim hujan yang datang terlambat atau terlalu panjang, serta musim kemarau yang sangat kering. Hal ini menyebabkan tanaman menjadi gagal panen, sehingga hasil pertanian menurun. Ketika panen gagal, petani tidak mendapat penghasilan seperti biasa. Akibatnya, kehidupan ekonomi mereka menjadi semakin sulit, bahkan bisa jatuh ke dalam kemiskinan. Masalah ini bisa semakin parah jika tidak ada bantuan atau kebijakan yang tepat dari pemerintah untuk membantu petani menghadapi perubahan iklim ini.

Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir di Indonesia banyak yang bekerja sebagai nelayan dan sangat bergantung pada laut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, karena emisi CO<sub>2</sub> yang tinggi, suhu air laut menjadi lebih panas dan tingkat keasaman laut meningkat. Hal ini membuat ikan sulit ditemukan karena mereka berpindah ke tempat yang lebih dalam atau lebih jauh. Selain itu, kerusakan pada terumbu karang juga mengurangi tempat tinggal ikan. Akibatnya, nelayan semakin sulit mendapatkan tangkapan, sementara biaya melaut menjadi lebih tinggi. Jika hasil tangkapan terus menurun, maka pendapatan mereka juga ikut turun, dan hal ini membuat masyarakat pesisir

semakin rentan terhadap kemiskinan. Firdaus dan Ubaidillah (2023) menemukan bahwa di Indonesia, emisi karbon berkontribusi terhadap menurunnya pendapatan masyarakat pesisir akibat terganggunya ekosistem laut, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan.

Adapun perkembangan emisi CO<sub>2</sub> dan tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2019 hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. 4 Emisi CO<sub>2</sub> Indonesia Tahun 2019-2024 (Juta Ton)**

Sumber: *World Bank, 2025*

Gambar 1.4 di atas menunjukkan bahwa emisi karbon di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, emisi karbon Indonesia mencapai 30,2 juta ton sebagai konsekuensi aktivitas ekonomi dan konsumsi energi fosil yang cukup intensif. Pada 2020, emisi turun menjadi 29,4 juta ton akibat menurunnya aktivitas industri selama masa pembatasan mobilitas pandemi COVID-19.

Emisi kembali menurun menjadi 26,9 juta ton pada 2021, Tren kenaikan berlanjut pada 2022 hingga tahun 2023 ketika emisi mencapai 29,3 juta ton,

didorong oleh peningkatan permintaan energi. Pada 2024, emisi sedikit menurun menjadi 27,3 juta ton.

Kecenderungan peningkatan emisi karbon, terutama setelah masa pandemi, memiliki implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Peningkatan emisi sering berkorelasi dengan aktivitas ekonomi berbasis energi fosil yang memicu polusi udara, memperbesar risiko kesehatan, dan dapat meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga miskin..

Penelitian Barbier (2010), dalam *Environment and Development Economics* menunjukkan bahwa degradasi lingkungan akibat peningkatan emisi karbon memperburuk kemiskinan di negara berkembang karena menurunnya produktivitas lahan dan kualitas sumber daya alam. Hallegatte *et al.* (2016) juga menemukan bahwa dampak perubahan iklim akibat emisi CO<sub>2</sub> dapat menghambat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan global. Jin *et al.* (2018) juga menunjukkan bahwa peningkatan CO<sub>2</sub> menurunkan produktivitas pertanian dan meningkatkan kemiskinan di negara tropis.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, terlihat bahwa ketimpangan pendapatan, inflasi, dan emisi CO<sub>2</sub> merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Berbagai penelitian terdahulu telah banyak membahas hubungan antara ketimpangan pendapatan dan inflasi terhadap kemiskinan, demikian pula penelitian yang mengkaji peran emisi CO<sub>2</sub> terhadap kemiskinan dari aspek lingkungan. Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara simultan menelaah hubungan ketiga variabel independen tersebut dalam satu model analisis. Padahal, ketimpangan pendapatan, tekanan

inflasi, dan peningkatan emisi CO<sub>2</sub> merupakan fenomena yang dapat memengaruhi kondisi kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang **“Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Inflasi dan Emisi CO<sub>2</sub> terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan melihat latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
3. Bagaimana pengaruh emisi CO<sub>2</sub> terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

3. Mengetahui pengaruh emisi CO<sub>2</sub> terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Maka Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Dapat menambah khasanah pengetahuan di bidang ekonomi pembangunan yang terkait dengan pengaruh ketimpangan pendapatan, inflasi dan emisi CO<sub>2</sub> terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia
2. Sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang ekonomi khususnya ekonomi pembangunan yang berhubungan dengan pengaruh ketimpangan pendapatan, inflasi dan emisi CO<sub>2</sub> terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini dapat memberikan masukan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.
2. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan penting bagi masyarakat dalam memahami berbagai faktor yang memengaruhi kemiskinan di Indonesia, khususnya dampak inflasi, ketimpangan pendapatan, dan emisi CO<sub>2</sub>.